



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : ditjenhubdat@dephub.go.id  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : UM.207/43/8/DRJD/2024

Jakarta, 04 Juli 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Hal : Undangan

Yth. Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia

Dalam rangka peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan transportasi darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia Tahun 2024 secara luring (*offline*) dan daring (*online*) dengan tema **“Sinergitas Kebijakan untuk Mewujudkan Transportasi Darat yang Berintegritas dan Berkeselamatan”**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon dengan hormat kepada Bapak/ibu Bupati/Walikota untuk menugaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat hadir secara daring (*online*) dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk hadir secara luring (*offline*) dan daring (*online*) (sesuai keterangan daftar terlampir) dalam acara Rakornis dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa – Kamis / 09 – 11 Juli 2024

Waktu : (Jadwal acara sebagaimana terlampir)

Tempat : • Video Conference melalui Aplikasi ZOOM Meeting  
Meeting ID : 913 0716 0067  
Password : rakornis

• Kempinski Grand Ballroom  
Grand Indonesia West Mall, Jl. Kebon Kacang Raya Blok D6,  
Kb. Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 10230

**Catatan:**

1. Pakaian : Pakaian Dinas Harian (PDH);
2. Biaya akomodasi, biaya harian dan biaya transportasi ditanggung oleh masing - masing;
3. Jumlah peserta yang dapat masuk ke dalam venue hanya **1 orang tiap unit kerja**;
4. Dimohon untuk registrasi kehadiran melalui tautan berikut:

<https://linktr.ee/RakornisHubdat2024> paling lambat **Senin, 08 Juli 2024** dan wajib melakukan **pengambilan akses masuk venue** sesuai jadwal terlampir;

**Provinsi Papua Pegunungan**

- 305. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nduga;
- 306. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya;
- 307. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tolikara;
- 308. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lanny Jaya;
- 309. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yakuhamo;

**Provinsi Papua Selatan**

- 310. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat;
- 311. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mappi;
- 312. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke;
- 313. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel;

**Provinsi Papua Tengah**

- 314. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire;
- 315. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paniai;
- 316. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- 317. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Jaya;
- 318. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak;

**Papua Barat Daya**

- 319. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong;
- 320. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat;
- 321. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong;
- 322. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Selatan;
- 323. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maybrat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.

NRP. 66110433

89. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan;
90. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal;
91. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;
92. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
93. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
94. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu;
95. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo;
96. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Humbang Hasundutan;
97. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang;
98. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
99. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batubara;
100. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan;

Provinsi Sumatera Barat

101. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam;
102. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
103. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
104. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
105. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
106. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman;
107. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
108. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
109. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung;
110. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok;
111. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
112. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar;
113. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi;
114. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang;
115. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangpanjang;
116. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman;
117. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh;
118. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto;
119. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok;
120. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto
121. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Agam;
122. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya;
123. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
124. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
125. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman;
126. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman;
127. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat;
128. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
129. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung;
130. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok;
131. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan;
132. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar;

**Provinsi Sumatera Selatan**

133. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin;
134. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
135. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat;
136. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim;
137. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
138. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas;
139. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
140. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
141. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
142. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
143. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
144. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
145. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
146. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau;
147. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
148. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang;
149. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih;
150. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara;
151. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

**Provinsi Riau**

152. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
153. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
154. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
155. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar;
156. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
157. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singgingi;
158. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan;
159. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
160. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
161. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak;
162. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai;
163. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru;
164. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis;
165. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir;
166. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu;
167. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti;
168. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singgingi;
169. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan;

**Provinsi Kepulauan Riau**

170. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan;
171. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun;

172. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
173. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga;
174. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna;
175. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjung Pinang;
176. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
177. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga;

Provinsi Jambi

178. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batanghari;
179. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo;
180. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci;
181. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin;
182. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
183. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun;
184. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
185. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
186. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo;
187. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi;
188. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh;
189. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari;
190. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo;
191. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin;
192. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
193. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Provinsi Bengkulu

194. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
195. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
196. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
197. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur;
198. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang;
199. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong;
200. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko;
201. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
202. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma;
203. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu;
204. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah;
205. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebong;
206. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mukomuko;
207. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong;

Provinsi Bangka Belitung

208. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
209. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
210. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
211. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
212. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung;

- 213. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- 214. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang;
- 215. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan;

#### Provinsi DKI Jakarta

- 216. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- 217. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 218. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 219. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 220. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 221. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 222. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

#### Provinsi Lampung

- 223. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- 224. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- 225. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 226. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- 227. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- 228. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji;
- 229. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran;
- 230. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- 231. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;
- 232. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 233. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 234. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus;
- 235. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan;
- 236. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung;
- 237. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro;

#### Provinsi Banten

- 238. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak;
- 239. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang;
- 240. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang;
- 241. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang;
- 242. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon;
- 243. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang;
- 244. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang;
- 245. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan;

#### Provinsi Jawa Barat

- 246. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
- 247. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- 248. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;
- 249. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor;
- 250. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;

251. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;  
252. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;  
253. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;  
254. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu;  
255. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;  
256. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan;  
257. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;  
258. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran;  
259. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta;  
260. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang;  
261. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi;  
262. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang;  
263. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;  
264. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
265. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar;  
266. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;  
267. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor;  
268. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi;  
269. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;  
270. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok;  
271. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi;  
272. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;

Provinsi Jawa Tengah

273. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara;  
274. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas;  
275. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang;  
276. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;  
277. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali;  
278. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes;  
279. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap;  
280. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;  
281. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;  
282. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara;  
283. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar;  
284. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen;  
285. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal;  
286. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten;  
287. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;  
288. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang;  
289. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati;  
290. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan;  
291. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;  
292. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;  
293. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;  
294. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;  
295. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang;

296. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen;
297. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
298. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
299. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung;
300. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri;
301. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo;
302. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;
303. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan;
304. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga;
305. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
306. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
307. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;

#### **Daerah Istimewa Yogyakarta**

308. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
309. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
310. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
311. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman;
312. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;

#### **Provinsi Jawa Timur**

313. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;
314. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
315. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar;
316. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
317. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
318. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik;
319. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
320. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang;
321. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri;
322. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
323. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang;
324. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun;
325. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan;
326. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
327. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto;
328. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
329. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi;
330. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;
331. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan;
332. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan;
333. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo;
334. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo;
335. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang;
336. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
337. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
338. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep;

339. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek;
340. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban;
341. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
342. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu;
343. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
344. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri;
345. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun;
346. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;
347. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mojokerto;
348. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan;
349. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo;
350. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya;

#### Provinsi Bali

351. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung;
352. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli;
353. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
354. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar;
355. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana;
356. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem;
357. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung;
358. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan;
359. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar;

#### Provinsi Nusa Tenggara Barat

360. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima;
361. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu;
362. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
363. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
364. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur;
365. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara;
366. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa;
367. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
368. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima;
369. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram;

#### Provinsi Nusa Tenggara Timur

370. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor;
371. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu;
372. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende;
373. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
374. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kupang;
375. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata;
376. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malaka;
377. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai;
378. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
379. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

380. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada;
381. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagekeo;
382. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao;
383. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
384. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka;
385. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat;
386. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
387. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
388. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur;
389. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
390. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
391. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang;
392. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belu;
393. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende;
394. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur;
395. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata;
396. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka;
397. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat;
398. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur;
399. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada;
400. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nagekeo;
401. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao;
402. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka;
403. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat;
404. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat Daya;
405. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Tengah;
406. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Timur;
407. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara;

#### Provinsi Kalimantan Barat

408. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;
409. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
410. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara;
411. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang;
412. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya;
413. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak;
414. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi;
415. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah;
416. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas;
417. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
418. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau;
419. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
420. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak;
421. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
422. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang;
423. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu;
424. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara;

- 425. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang;
- 426. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Landak;
- 427. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi;
- 428. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau;
- 429. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau;

**Provinsi Kalimantan Selatan**

- 430. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan;
- 431. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar;
- 432. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- 433. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 434. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 435. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- 436. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru;
- 437. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong;
- 438. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- 439. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 440. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin;
- 441. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru;
- 442. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin;
- 443. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan;
- 444. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 445. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 446. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- 447. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu;
- 448. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru;
- 449. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin;

**Provinsi Kalimantan Tengah**

- 450. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 451. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- 452. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara;
- 453. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- 454. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas;
- 455. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan;
- 456. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 457. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 458. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau;
- 459. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya;
- 460. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- 461. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara;
- 462. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan;
- 463. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;
- 464. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan;
- 465. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur;
- 466. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara;
- 467. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Katingan;

- 468. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;
- 469. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya;
- 470. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara;
- 471. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;

Provinsi Kalimantan Timur

- 472. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau;
- 473. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- 474. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 475. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- 476. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 477. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser;
- 478. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 479. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan;
- 480. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang;
- 481. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
- 482. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau;
- 483. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat;
- 484. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur;
- 485. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu;

Provinsi Kalimantan Utara

- 486. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan;
- 487. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau;
- 488. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan;
- 489. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- 490. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan;

Provinsi Gorontalo

- 491. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo;
- 492. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- 493. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo;
- 494. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- 495. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato;
- 496. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo;

Provinsi Sulawesi Utara

- 497. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 498. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- 499. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- 500. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 501. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 502. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- 503. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 504. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa;
- 505. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- 506. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 507. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- 508. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung;
- 509. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu;
- 510. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado;
- 511. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tomohon;
- 512. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- 513. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- 514. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- 515. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 516. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 517. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 518. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan;
- 519. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 520. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara;

#### Provinsi Sulawesi Selatan

- 521. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng;
- 522. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru;
- 523. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone;
- 524. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba;
- 525. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang;
- 526. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa;
- 527. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto;
- 528. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 529. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu;
- 530. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- 531. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- 532. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros;
- 533. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- 534. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang;
- 535. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 536. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai;
- 537. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng;
- 538. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar;
- 539. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- 540. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara;
- 541. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo;
- 542. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
- 543. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo;
- 544. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare;
- 545. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- 546. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone;

- 547. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba;
- 548. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang;
- 549. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa;
- 550. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto;
- 551. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu;
- 552. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur;
- 553. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara;
- 554. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maros;
- 555. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- 556. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang;
- 557. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 558. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai;
- 559. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;
- 560. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;
- 561. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja;
- 562. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara;
- 563. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo;

#### Provinsi Sulawesi Tenggara

- 564. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana;
- 565. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton;
- 566. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan;
- 567. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- 568. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara;
- 569. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka;
- 570. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- 571. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- 572. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe;
- 573. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 574. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- 575. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 576. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna;
- 577. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat;
- 578. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wakatobi;
- 579. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bau-Bau;
- 580. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari;
- 581. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana;
- 582. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton;
- 583. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan;
- 584. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Tengah;
- 585. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara;
- 586. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka;
- 587. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur;
- 588. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 589. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan;
- 590. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara;
- 591. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muna;

592. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Barat;

Provinsi Sulawesi Tengah

- 593. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai;
- 594. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 595. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Laut;
- 596. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol;
- 597. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala;
- 598. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
- 599. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara;
- 600. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- 601. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso;
- 602. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi;
- 603. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- 604. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toli-Toli;
- 605. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu;
- 606. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai;
- 607. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 608. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Laut;
- 609. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buol;
- 610. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara;
- 611. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong;
- 612. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tojo Una-Una;

Provinsi Sulawesi Barat

- 613. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene;
- 614. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa;
- 615. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju;
- 616. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- 617. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- 618. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- 619. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mamuju;
- 620. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju;

Provinsi Maluku

- 621. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru;
- 622. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- 623. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- 624. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 625. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 626. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- 627. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 628. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- 629. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 630. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon;
- 631. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual;
- 632. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan;

- 633. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 634. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah;
- 635. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara;
- 636. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 637. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur;

#### Provinsi Maluku Utara

- 638. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 639. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- 640. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
- 641. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- 642. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
- 643. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- 644. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- 645. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
- 646. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate;
- 647. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- 648. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah;
- 649. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara;
- 650. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan;
- 651. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur;
- 652. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Tailabu;

#### Provinsi Papua

- 653. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- 654. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
- 655. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Keerom;
- 656. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 657. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- 658. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarmi;
- 659. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Supiori;
- 660. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Waropen;
- 661. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura;
- 662. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Keerom;
- 663. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya;
- 664. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarmi;
- 665. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen;

#### Provinsi Papua Barat

- 666. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak;
- 667. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kaimana;
- 668. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari;
- 669. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
- 670. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak;
- 671. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- 672. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
- 673. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari Selatan;

674. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pegunungan Arfak;

Provinsi Papua Pegunungan

- 675. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
- 676. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lanny Jaya;
- 677. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 678. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nduga;
- 679. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang;
- 680. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolikara;
- 681. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo;
- 682. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo;
- 683. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 684. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pegunungan Bintang;
- 685. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yalimo;

Provinsi Papua Tengah

- 686. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deiyai;
- 687. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dogiyai;
- 688. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Intan Jaya;
- 689. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika;
- 690. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire;
- 691. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paniai;
- 692. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Puncak;
- 693. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
- 694. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deiyai;
- 695. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dogiyai;
- 696. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Intan Jaya;

Papua Barat Daya

- 697. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maybrat;
- 698. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat;
- 699. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong;
- 700. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
- 701. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw;
- 702. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sorong;
- 703. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tambrauw.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.

NRP. 66110433

**RUNDOWN RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT  
TAHUN 2024  
(KEMPINSKI GRAND BALLROOM, JAKARTA)**

**HARI SELASA, 09 JULI 2024**

NO	DURASI	WAKTU	KETERANGAN	LOKASI
1.	420'	09.00 – 16.00	Pengambilan Akses Venue & Seminar Kit	Lobby Kempinski Grand Ballroom

**HARI RABU, 10 JULI 2024**

NO	DURASI	WAKTU	KETERANGAN
1.	90'	07.00 – 08.30	Registrasi Peserta
2.	30'	08.30 – 09.00	Clear Area
3.	10'	09.00 – 09.10	Tari Pembuka
4.	5'	09.10 – 09.15	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya & Mars Perhubungan
5.	5'	09.15 – 09.20	Do'a
6.	5'	09.20 – 09.25	Pembukaan & Video Profil Ditjen Hubdat
7.	10'	09.25 – 09.35	<b>Sambutan Rakornis 2024 Oleh Menteri Perhubungan</b>
8.	15'	09.35 – 09.35	Penyerahan Penghargaan: Instansi Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 H
9.	15'	09.50 – 10.00	<b>Pengarahan dan Pembukaan Rakornis 2024 oleh Wakil Presiden/ Menteri Perhubungan</b>
10.	10'	10.00 – 10.10	Foto bersama
11.	90'	10.10 – 11.15	<b>Panel 1</b>
12.	10-15'		1. Kemenkeu (Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat)
13.	10-15'		2. BPK (Tata Kelola Keuangan Negara Yang Berkualitas dan Bermanfaat);
14.	10-15'		3. KPK (Pembentukan Budaya Anti Korupsi Melalui Pembinaan, Pendidikan dan Sosialisasi Anti Korupsi);
15.	10-15'		4. Kejaksaan Agung (Pendampingan Hukum dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat);
16.	30'	11.15 – 11.45	Tanya Jawab
17.	75'	11.45 – 13.00	Ishoma
18.	15'	13.00 – 13.15	Fun Games
19.	90'	13.15 – 14.15	<b>Panel 2</b>
20.	10-15'		1. Bappenas (Rencana Aksi Keselamatan Daerah Mendukung Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat);
21.	10-15'		2. Kirlantas (Kolaborasi dan Sinergitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
22.	10-15'		3. Bina Marga, Kemenpupr (Jalan Yang Berkeselamatan Melalui Pemeringkatan Bintang);
23.	10-15'		4. Kemendagri, (Upaya Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
24.	30'	14.15 – 14.45	Tanya Jawab
25.	5'	14.45 – 14.50	Penutupan
26.	60'	14.50 – 15.50	Hiburan (Live Music)

**HARI KAMIS, 11 JULI 2024**

<b>NO</b>	<b>DURASI</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	5'	09.00 – 09.05	Pembukaan MC
2.	15'	09.05 – 09.20	<p>Penyerahan Penghargaan Pemerintah Daerah/Instansi/Unit Kerja Yang Optimal Dalam Penyelenggaraan Bidang Transportasi Darat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemda Yang Melaksanakan Pengalihan Pengelolaan Pengembangan Angkutan Perkotaan Skema BTS;</li> <li>2. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Terbaik;</li> <li>3. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Terbaik;</li> <li>4. Terminal Tipe A Terbaik;</li> <li>5. Pelabuhan Penyeberangan Terbaik;</li> <li>6. Balai Pengelola Transportasi Darat Terbaik.</li> </ul>
3.	10'	09.20 – 09.30	Penyematan <i>Brand Ambassador</i> Ditjen Hubdat
4.	20'	09.30 – 09.50	<b>Pengarahan Oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat</b>
5.	120'	09.50 – 11.20	<b>Panel 1</b>
6.	10-15'		<b>1. Sesditjen Hubdat</b> (Pengenalan dan Sosialisasi Aplikasi MitraDarat)
7.	10-15'		<b>2. Dir. Sarana Transportasi Jalan</b> (Optimalisasi Pelayanan Uji Berkala Dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum Di Daerah Dalam Rangka Upaya Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan)
8.	10-15'		<b>3. Dir. Prasarana Transportasi Jalan</b> (Optimalisasi Fungsi Terminal Dalam Pengawasan Keselamatan Angkutan Jalan)
9.	10-15'		<b>4. Dir. Lalu Lintas Jalan</b> (Peningkatan Peran PPNS Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
10.	10-15'		<b>5. Dir. Angkutan Jalan</b> (Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Jalan Yang Berkeselamatan)
11.	10-15'		<b>6. Dir. Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan</b> (Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran)
12.	30'	11.20 – 11.50	Tanya Jawab
13.	15'	11.50 – 12.05	<i>Fun Games</i>
14.	10'	12.05 – 12.15	<b>Laporan Akhir Kegiatan Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat</b>
15.	10'	12.15 – 12.20	Foto Bersama
16.	5'	12.20 – 12.50	Penutupan Oleh MC
17.	30'	12.50 – 13.20	Makan Siang